



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 215 TAHUN 2021**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, maka Pemerintah Daerah perlu Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Peraturan ini, yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi, merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang secara khusus disusun untuk menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2021- 2026.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
- BAB III : LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI;
- BAB IV : SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026;
- BAB V : MANAJEMEN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI; dan
- BAB VI : PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 216



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 215 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Landasan Hukum.....	8
3. Maksud dan Tujuan.....	9
4. Keterkaitan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan dengan RPJMD dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Nasional.....	10
5. Langkah-langkah Penyusunan <i>Road map</i> Reformasi Birokrasi.....	10
6. Sistematika Dokumen.....	12
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	14
1. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....	14
2. Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan.....	16
BAB III LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI	25
1. Lingkungan Reformasi Birokrasi.....	25
1.1 Permasalahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2016-2020.....	25
1.2 Hal Baik yang Sudah Dicapai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2016-2020.....	26
2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan.....	26
BAB IV SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026	29
1. Tujuan.....	29
2. Sasaran.....	29
3. Strategi Pelaksanaan.....	30
4. Program.....	30
5. Quick Wins.....	68
6. Rencana Aksi.....	70
BAB V MANAJEMEN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI	71
1. Pelaksana.....	71
2. Monitoring dan Evaluasi.....	71
3. Pendanaan.....	74
4. Sinkronisasi <i>Road Map</i> dengan Rencana Strategis.....	74
BAB VI PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Gambar 1 Roadmap Nasional 2010-2025	6
Gambar 2 Roadmap Nasional 2020-2024	7
Gambar 3 Kerangka berpikir Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	10
Gambar 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	16
Gambar 5 Manajemen Perubahan	16
Gambar 6 Penataan Peraturan Perundang-undangan.....	17
Gambar 7 Penataan dan Penguatan Organisasi.....	18
Gambar 8 Penataan Tatalaksana.....	19
Gambar 9 Penataan Sistem Manajemen SDM.....	20
Gambar 10 Penguatan Akuntabilitas	21
Gambar 11 Penguatan Pengawasan.....	22
Gambar 12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	23
Gambar 13 Perencanaan Terintegratif Dalam Mencapai Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pacitan.....	28
Gambar 14 Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026	30
Gambar 15 Kerangka Alur Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Kegiatan Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	31
Tabel 2 Kegiatan Prioritas Pemeliharaan untuk Hal-Hal yang Sudah Baik/Maju	43
Tabel 3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan	45
Tabel 4 Quick Wins Pelaksanaan Refromasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026	69

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tuntutan masyarakat yang sangat penting adalah peningkatan kinerja layanan publik maupun kinerja pembangunan di dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kinerja layanan publik maupun kinerja pembangunan tersebut harus bisa merata dan berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kualitas layanan, mampu menetapkan standar layanan berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan melakukan sistem pelayanan yang berkualitas. Disisi lain kondisi ekonomi, sosial dan politik yang dinamis menjadi tantangan maupun peluang dalam memberikan kinerja yang memuaskan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan kebutuhan yang mendukung pembangunan.

Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang dijelaskan Lembaga Administrasi Negara (2006:6) bahwa *good governance* berorientasi pada 2 hal pokok yaitu: pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan serta mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan segala elemen konstituennya, dan kedua pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu aspek yang paling menentukan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak. Maka dari itu gerakan reformasi diharapkan dapat menata dan mendesain pelaksanaan pemerintahan kearah yang lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintahan yang efektif dan efisien dapat dijalankan apabila pemerintahan tersebut memiliki pembagian porsi sumber daya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai selama masa pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas-prioritas kebijakan terlebih dahulu. Prioritas tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan yang juga akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang ada. Alokasi sumber daya yang ada dapat difokuskan pada prioritas tertentu yang akan berdampak secara luas bagi kepentingan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sumbu penentu suatu pemerintahan berjalan dengan efektif atau tidak. Tata kelola pemerintahan adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan negara untuk mendukung kinerja pemerintahan. Tata kelola dan kinerja akan berjalan beriringan, apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik maka kinerja pemerintahan juga akan baik, dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan

yang efektif, efisien dan profesional diyakini mampu menjadi titik unkit kinerja di segala bidang.

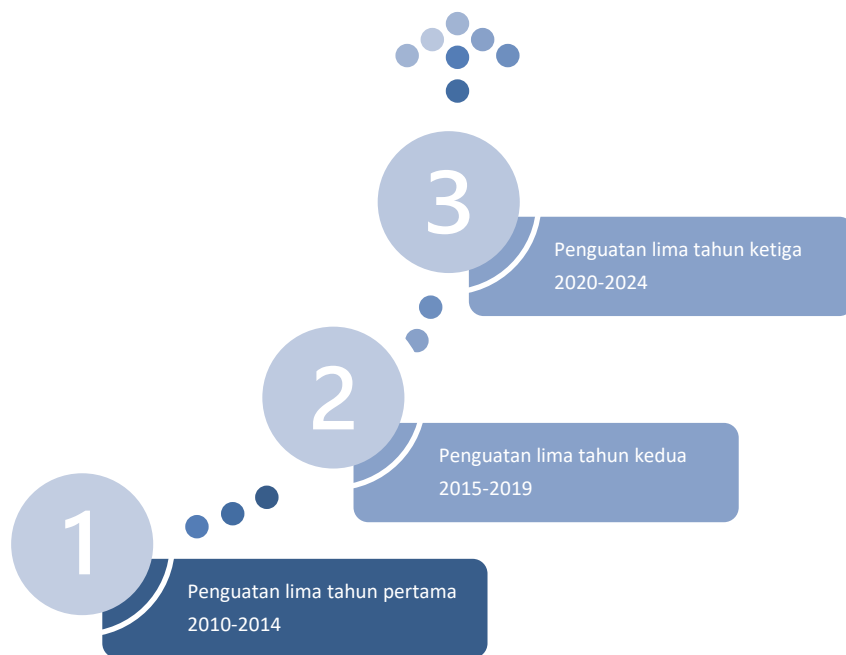
Di era global seperti sekarang ini, Pemerintah juga dihadapkan dengan tuntutan pelayanan modern berbasis AI (*Artificial Intelligence*), IoT (*Internet of Things*), serta *big data*. Pemanfaatan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut disebut dengan *e-government*. Teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, *e-government* juga diharapkan dapat mendukung tata kelola, produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan. Dengan demikian, untuk menghadapi era global maka pemerintah daerah dituntut untuk membangun komitmen di segala bidang.

Sementara itu setiap pemerintah daerah memiliki batas periode pemerintahan yang sangat terbatas, yaitu hanya 5 tahun dalam 1 periode pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah dalam merancang tata kelola pemerintahannya. Berbagai prioritas kebijakan harus dijalankan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan pengelolaan pemerintah daerah yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Road map merupakan dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melakukan strategi yang ditampilkan dari waktu ke waktu. Road map tata kelola pemerintahan disusun dan dilakukan 5 tahun sekali secara rinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas. Sebagai salah satu daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik, wujud nyata untuk mengawalinya adalah merancang Road map tata kelola pemerintahan. Road map ini menjadi panduan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan seluruh perbaikan secara bertahap pada setiap dimensi tata kelola pemerintahan, memperjelas pembagian peran, tanggung jawab dan target.

Road map Reformasi Birokrasi merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi tertuang dalam Road map Reformasi Birokrasi. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 merupakan

amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi terbagi dalam tiga periode, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2021.



Gambar 1 Road Map Nasional 2010-2025

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam *Road map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road map* ini dibandingkan dengan *Road map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, *Road map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar Reformasi Birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih

holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Road map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, melanjutkan dari *Grand Design* dan Road map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024 Reformasi Birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Pada Road map ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.



Gambar 2 Road Map Nasional 2020-2024

2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan pada penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

3. Maksud dan Tujuan

Dengan merujuk pada semangat pembaharuan dan semangat perubahan menuju pemerintahan yang dinamis serta tata kelola pemerintahan yang modern maka penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dimaksudkan sebagaimana tertulis secara spesifik seperti dibawah ini:

1. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, xxberintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
2. Mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan pemerintahan yang bersifat *dynamic governance*, sesuai pada *grand design* Reformasi Birokrasi nasional.

Dynamic Governance yaitu pemerintah yang adaptif dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dalam dunia yang selalu berubah-ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti, tidak statis dan hanya

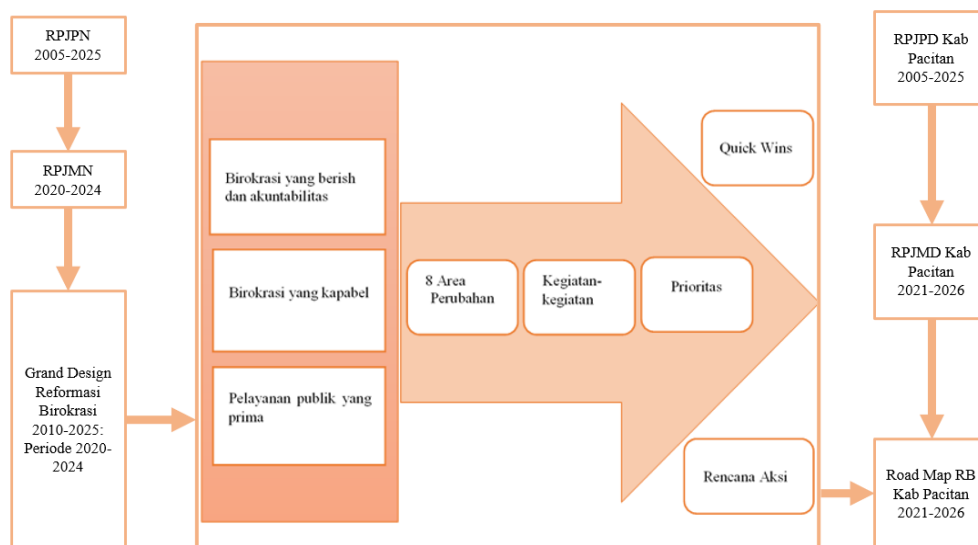
berdasarkan keputusan individualistik, melainkan bersifat dinamis. Nilai yang mendasari *dynamic governance*, yaitu integritas sosial, meritokrasi dalam sektor pembangunan dan rasional.

Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Memberikan kesamaan pemahaman bagi PD mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Memberikan panduan bagi PD Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

4. Keterkaitan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan dengan RPJMD dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional

Keterkaitan antara *Road map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan nasional RPJMN 2020-2024, sasaran reformasi birokrasi, RPJPD Kabupaten Pacitan dan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka berpikir *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

5. Langkah-langkah Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi

Menurut Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, yang mana dalam Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tidak tercantum langkah-langkah umum penyusunan *Road map* Reformasi

Birokrasi maka dalam penyusunan Road map Kabupaten Pacitan masih menggunakan regulasi yang lama. Langkah-langkah Umum Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. *Assessment* Organisasi

Penilaian terhadap kondisi organisasi saat ini:

- a) Target kinerja yang harus dicapai 5 tahun ke depan.
- b) Bagaimana kapasitas organisasi untuk mencapai target 5 tahun ke depan.
- c) Bagaimana harapan publik terhadap organisasi.
- d) Apa kemajuan yang sudah dicapai.
- e) Isu-isu strategis yang dihadapi.

2. Kondisi Yang Diinginkan

Penilaian terhadap organisasi yang diinginkan:

- a) Bagaimana seharusnya kondisi organisasi agar dapat terwujud target kinerja yang harus dicapai agar sesuai dengan RPJMN/RPJMD.
- b) Target-target apa yang ingin diperbaiki/disempurnakan melalui reformasi birokrasi.

3. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan yang menjadi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan:

- a) Permasalahan-permasalahan di area perubahan yang spesifik terjadi di organisasi.
- b) Keterkaitan antar permasalahan.
- c) Prioritas permasalahan.

4. Rencana Aksi Perubahan

Penyusunan Rencana Aksi perubahan untuk memecahkan berbagai permasalahan agar organisasi dapat mencapai kondisi yang diharapkan:

- a) Menetapkan target-target dan prioritas.
- b) Melakukan pemeliharaan/meningkatkan terhadap hal yang sudah baik.
- c) Menyusun rencana aksi untuk pemecahan masalah organisasi.

Melalui empat langkah-langkah diatas, maka akan dihasilkan dokumen Road map Reformasi Birokrasi di Instansi pemerintah yang harapannya dapat menuju terwujudnya birokrasi berkinerja tinggi.

6. Sistematika Dokumen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sistematika dokumen Road map RB, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan susbtansi Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *quick wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintah bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian mengenai 8 area perubahan reformasi birokrasi.

2. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Menguraikan indikator capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2016-2020. Capaian kinerja kegiatan tersebut sesuai dengan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.

Bab III Lingkungan Reformasi Birokrasi

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

2. Isu Strategis RB

Bab IV Saasran Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026

1. Tujuan

2. Sasaran

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan prioritasnya.

3. Strategi Pelaksanaan

4. Program-Program (Mikro)

Menguraikan program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).

5. *Quick Wins*

6. Rencana Aksi

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab V Manajemen Pelaksana Reformasi Birokrasi

1. Pelaksana.

2. Monitoring dan Evaluasi.

3. Pendanaan.

4. Sinkronisasi Road map dengan Rencana Strategis.

Bab VI Penutup

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Hingga saat ini, sekitar 130 Pemerintah Daerah belum menjalankan agenda Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa berbagai program Reformasi Birokrasi minim *value* karena para aparatur di Pemerintah Daerah tidak memahami filosofi program yang bersangkutan. Program seringkali diadopsi dari daerah lain yang dianggap berhasil, meskipun secara kontekstual tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengadopsi program tersebut. Hal ini terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program reformasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditujukan hanya sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi. Melihat kondisi ini, “*demand-based reform*” perlu menjadi fokus pemerintah ke depan. Proses pembelajaran dalam transfer kebijakan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dianggap relatif berhasil dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya mutlak diperlukan. Tidak hanya ini perlu diusahakan dalam meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi tetapi juga menciptakan *value* baru di lingkungan instansi masing-masing yang mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *culture-set-nya*.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam melakukan penilaian perkembangan RB cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Perubahan *Mindset* dan Budaya Kinerja di Lembaga Organisasi.
2. Deregulasi Kebijakan.
3. Penyederhanaan Organisasi (*evaluasi Kelembagaan*).
4. Perbaikan Tata Laksana (*Pembuatan proses bisnis/SOP pelayanan publik*).
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran.
7. Penguatan Pengawasan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Upaya-upaya tersebut merupakan representasi dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam Road map Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klusterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam Road map baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan *output* dari masing-masing area. Selain isu klusterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam "*list of priority*" yang masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:



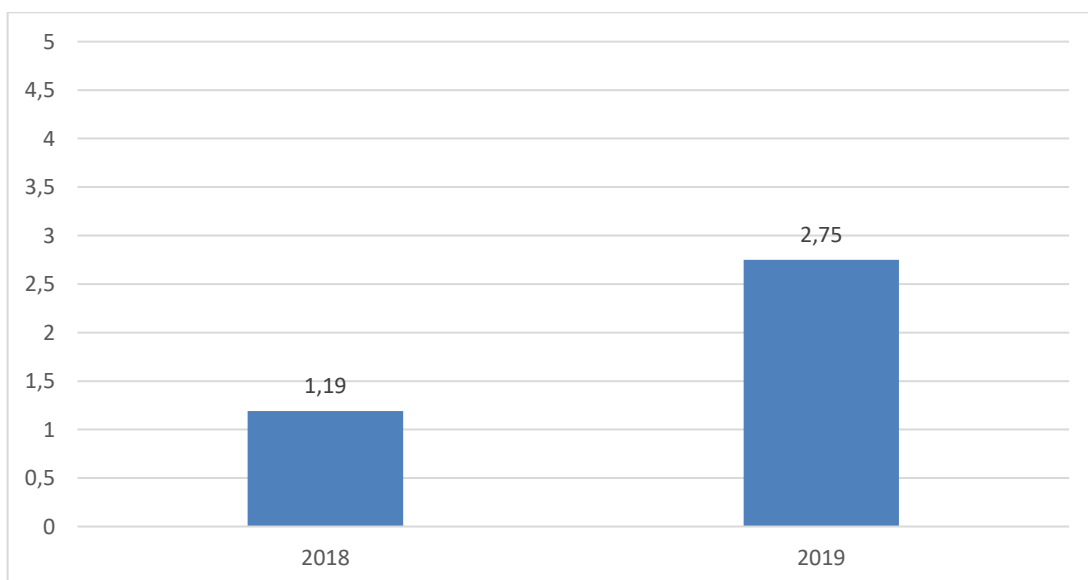
Gambar 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Sumber: Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020

2. Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan

a. Perubahan *Mindset* dan Budaya Kinerja di Lembaga Organisasi

Undang undang nomor 5 Tahun 2014 mendorong daerah untuk semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

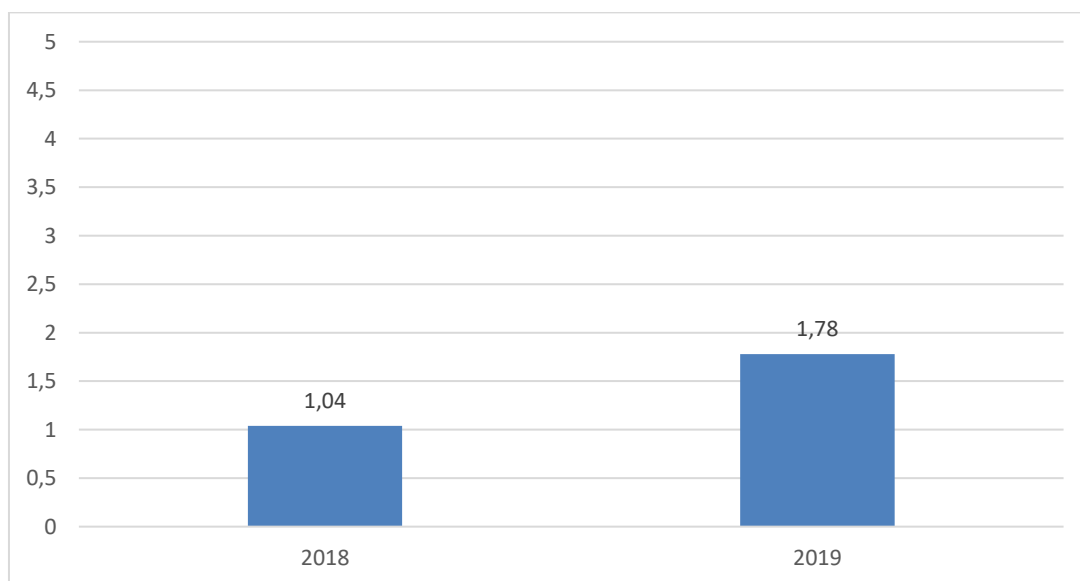


Gambar 5 Manajemen Perubahan

Berdasarkan tahun 2018 nilai manajemen perubahan sebesar 1.19 dan di tahun 2019 sebesar 2.75. dalam satu tahun ada kenaikan yang cukup signifikan pada manajemen perubahan sebesar 1.56. Pada tahun 2020 berdasarkan atas laporan hasil evaluasi mengungkapkan bahwa evaluasi atas kinerja para agen perubahan budaya kerja level PD belum optimal di lakukan, serta belum memperlihatkan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Bobot maksimal manajemen perubah yaitu 2.75 maka perlu ada optimalisasi manajemen perubahan terkait perubahan budaya birokrasi.

b. Deregulasi Kebijakan

Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah yang dinilai menghambat.

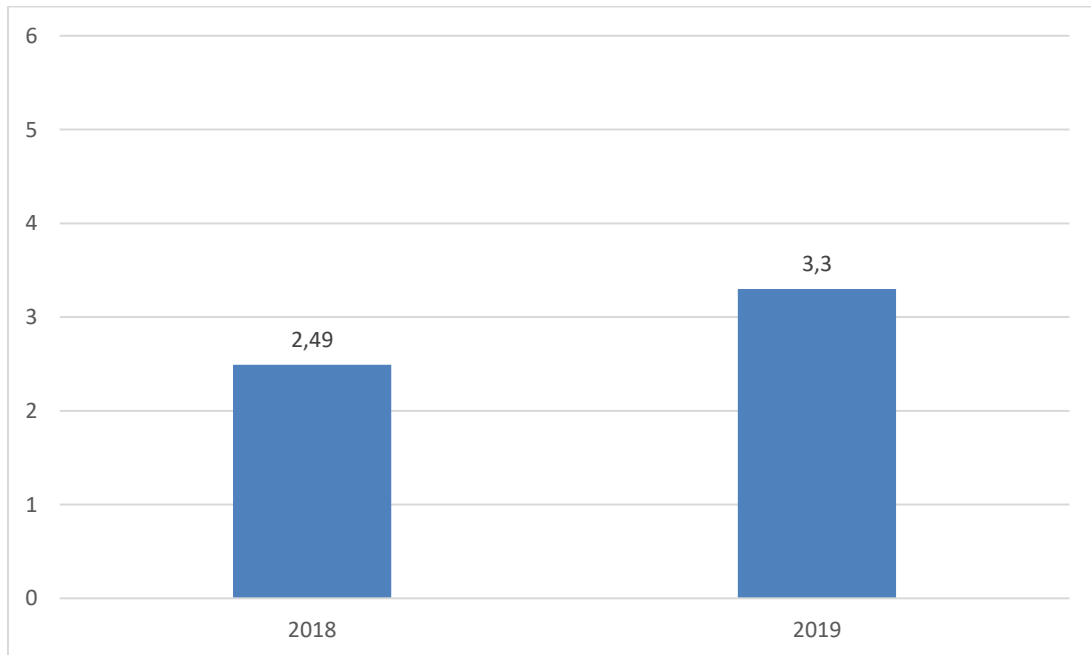


Gambar 6 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai penataan peraturan perundang-perundangan meningkat menjadi 1.78, ada kenaikan sebesar 0.74. namun masih jauh dari bobot maksimal sebesar 5.00.

c. Penyederhanaan Organisasi (evaluasi Kelembagaan)

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

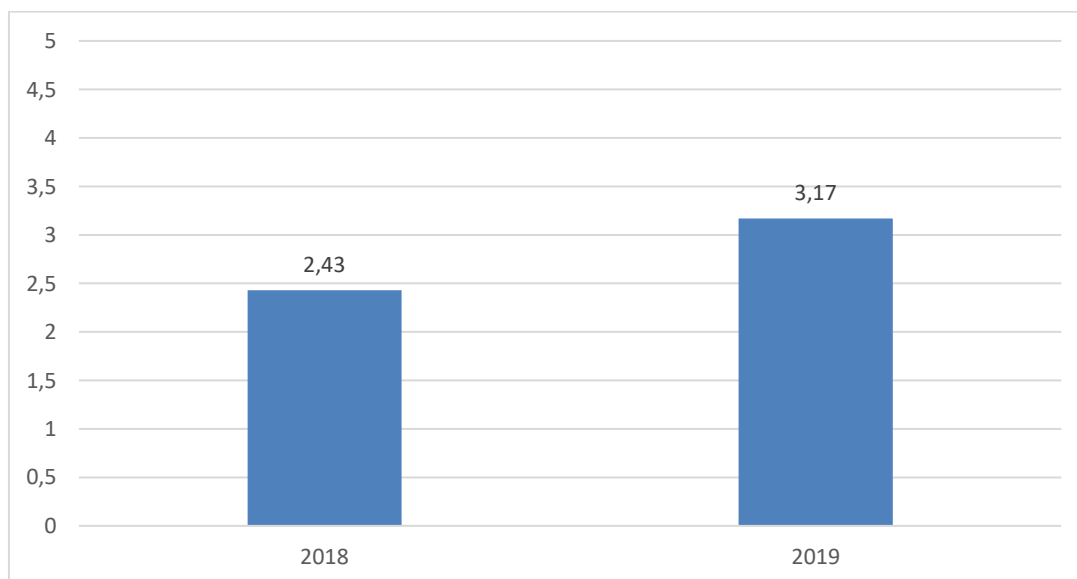


Gambar 7 Penataan dan Penguatan Organisasi

Penyederhanaan organisasi tahun 2018 sebesar 2.49 meningkat di tahun 2019 menjadi 3.3. Bobot maksimal dalam penataan organisasi yaitu 6. Kabupaten Pacitan di harapkan dapat melakukan Penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabtan fungsional belum diterapkan secara menyeluruh.

d. Perbaikan Tata Laksana (Pembuatan Proses Bisnis/SOP Pelayanan Publik)

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik.



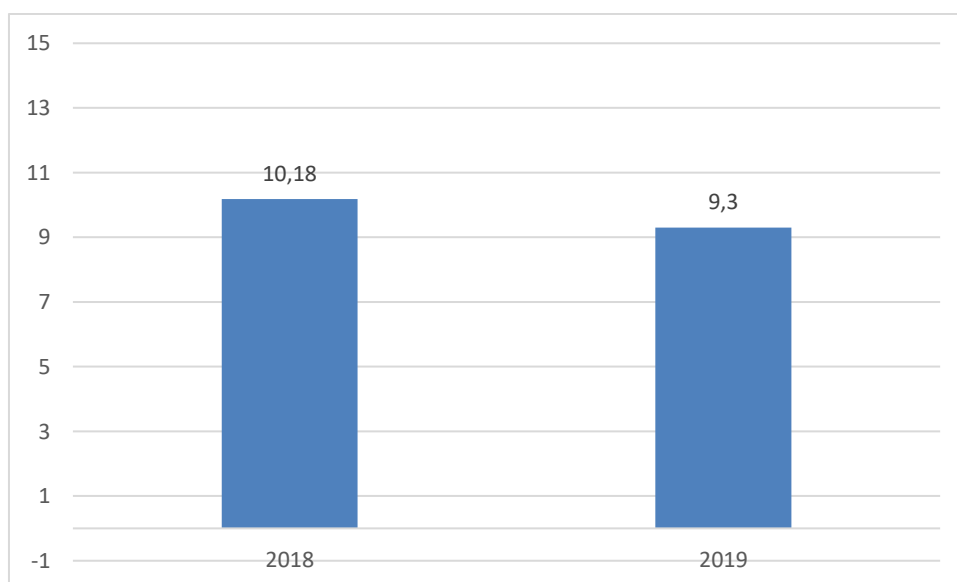
Gambar 8 Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana di Kabupaten Pacitan di tahun 2018 mencapai 2.43, di tahun 2019 meningkat menjadi 3.17. hal ini menunjukkan bahwa ada upaya peningkatan penataan tatalaksana di tahun 2019. Pada tahun 2020 masih perlu diperbaiki yang meliputi:

1. Belum di susunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum di lakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD.
2. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemkab Pacitan belum sepenuhnya optimal, seperti belum optimalnya pemanfaatan grand design dalam pengembangan SPBE dan integrasi aplikasi.

e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent Pool* ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.



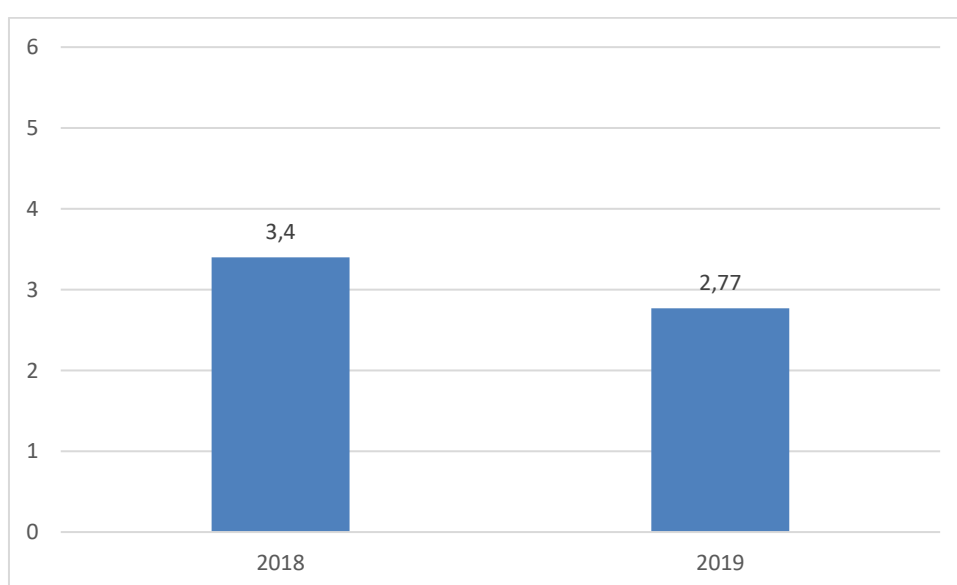
Gambar 9 Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sumberdaya manusia di Kabupaten Pacitan nilainya mengalami penurunan. Tahun 2018 sebesar 10.18 ditahun 2019 menurun menjadi 9.3. pada tahun 2020 berdasarkan capaian mengungkap pada penataan sumber daya manusia aparatur, antara lain:

1. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM dikarenakan tindaklanjut assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP).
2. Belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemerataan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi.
3. Nilai merit sistem tahun 2020 sebesar 101 yang artinya buruk.
4. ASN profesionalitas dengan nilai 57 artinya sangat rendah.

f. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.



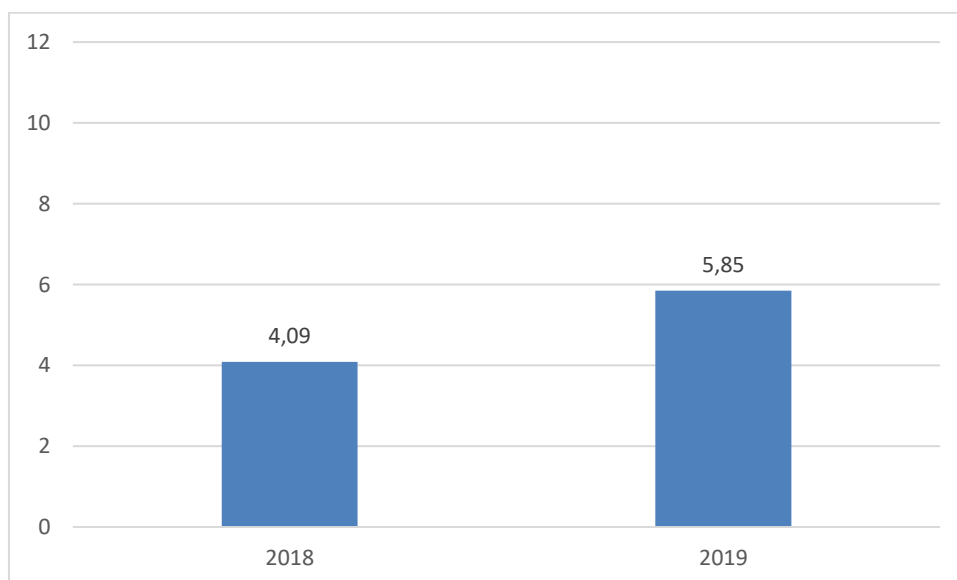
Gambar 10 Penguatan Akuntabilitas

Kualitas akuntabilitas mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2.77 yang sebelumnya tahun 2019 akuntabilitas dengan nilai 3.4. Laporan hasil evaluasi reformasi birokrasi mencata bahwa tahun 2020 kualitas implementasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Capaian akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil baik dengan nilai SAKIP 68.69 (B) pada tahun 2019 dan akuntablitas keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2019.

g. Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki

dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Gambar 11 Penguatan Pengawasan

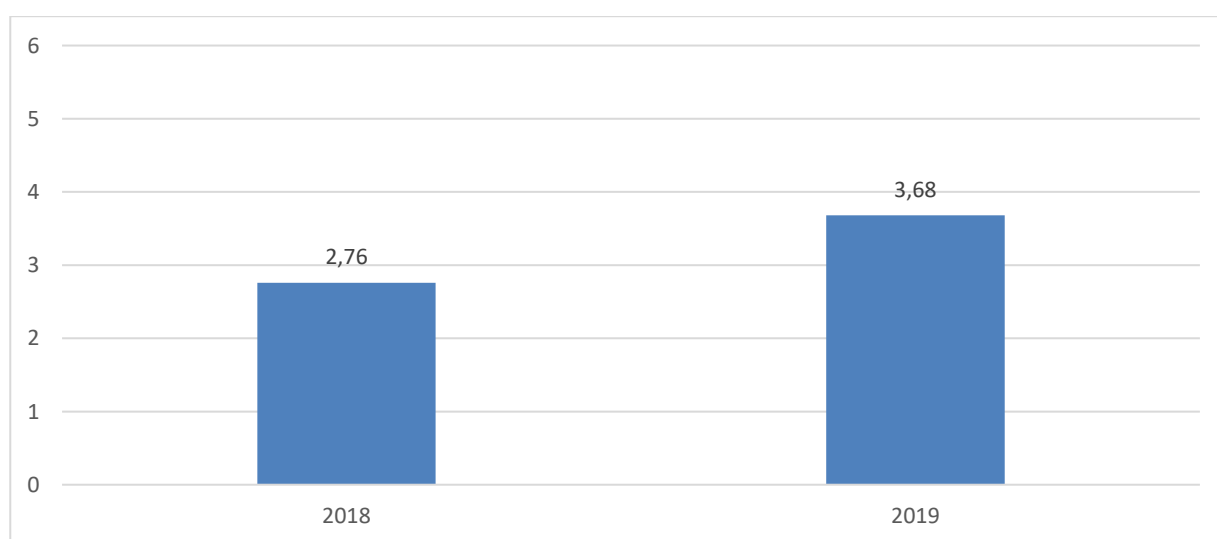
Pada area perubahan pengawasan di tahun 2019 sebesar 5.85 mengalami kenaikan, yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 4.09, namun masih kurang optimal mengingat bahwa bobot maksimal dari unsur penguatan pengawasan sebesar 12. Pada tahun 2020 mencatat bahwa:

1. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di level PD.
2. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih perlu di tingkatkan antara lain: penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, *whistle blowing system*, pembangunan zona integritas serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.
3. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan

publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.



Gambar 12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tahun 2018 kualitas pelayanan publik sebesar 2.76, sedangkan di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 3.68. tahun 2020 masih banyak terjadi masalah pada pelayanan publik antara lain :

1. Implementasi pelayanan publik khususnya di PD pelayanan dalam hal sistem kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan tidak lanjut hasil survei kepuasan baru diberlakukan kepada sebagian kecil PD.
2. Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan telah meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Hasil survei korupsi tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini karena Kabupaten Pacitan belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi.

BAB III LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

1.1 Permasalahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2016-2020

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibangun di tingkat Pemkab Pacitan dan Perangkat Daerah namun kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat PD belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Kabupaten.
- b. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di level PD.
- c. Evaluasi atas kinerja para agen perubahan/keompok budaya kerja level PD belum optimal dilakukan.
- d. Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemkab dan PD belum sepenuhnya disusun.
- e. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diterapkan menyeluruh.
- f. Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD.
- g. Penerapan *E-Government* di lingkungan Pemkab Pacitan belum sepenuhnya optimal, seperti belum optimalnya pemanfaatan *Grand Design* dalam pengembangan SPBE dan integrasi aplikasi.
- h. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritical/suksesi.
- i. Kualitas implementasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.
- j. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan antara lain, penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, *Whistle Blowing System* (WBS), pembangunan Zona integritas serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- k. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*.

1. Implementasi pelayanan publik khususnya di PD pelayanan dalam hal, sistem kompensasi kepada penerima layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat baru diberlakukan kepada sebagian kecil PD.

1.2 Hal Baik yang Sudah Dicapai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2016-2020

- a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang baik dengan nilai SAKIP 68,59/Predikat B pada tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari BPK pada tahun 2019).
- b. Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan.
- c. Kualitas pengelolaan arsip Pemerintah Kabupaten Pacitan dinilai sangat baik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dengan nilai 73,8.
- d. Penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan masuk dalam kategori terdefinisi atau maturitas SPIP berapa pada level 3.

2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi. Dinamika tersebut dapat dilihat isu-isu dalam tata kelola pemerintahan daerah. Isu merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil telaah permasalahan dan potensi serta hasil diskusi antar *stakeholder* maka setidaknya terdapat beberapa isu yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada lima tahun kedepan yakni sebagai berikut:

Isu pertama yakni besarnya tuntutan layanan publik yang responsif dan adaptif. Berubahnya perilaku masyarakat dan era adaptasi baru, menuntut pelayanan disektor pemerintahan untuk lebih cepat, efisien dan akuntabel. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh pemerintah yakni memaksimalkan potensi

teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik sehingga dapat mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan pada bidang perizinan, kependudukan dan catatan sipil, layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui Reformasi Birokrasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ditengah berbagai tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, dengan demikian pemerintah daerah diharuskan lebih responsif dan adaptif untuk menjawab tantangan yang ada. Harapannya kedepan Kabupaten Pacitan dengan potensi yang dimiliki tidak hanya fokus pada digitalisasi pelayanan publik tapi dapat menerapkan dan mengembangkan *smart city*.

Isu kedua yakni perlunya penanganan kesenjangan kompetensi dengan tingkat pendidikan dan penempatan jabatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Pada saat ini masih terdapat ASN di Kabupaten Pacitan dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah, hal ini membutuhkan perhatian khusus mengingat tingkat pendidikan ASN akan berpengaruh pada pola pikir dan kinerjanya. Penambahan tenaga teknis atau pengembangan kompetensi teknis untuk ASN menjadi langkah antisipasi yang cukup efektif untuk memperkecil kesenjangan kompetensi. Tuntutan pengembangan kompetensi menjadi hal yang lumrah pada saat ini, akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan antusiasme sumber daya aparatur Kabupaten Pacitan. Kendala di atas diharapkan akan berkurang dengan adanya perubahan mindset pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak lagi sebagai kewajiban namun sebagai hak aparatur dan mendapatkan dukungan dari semua *stakeholder*.

Isu ketiga adalah budaya kerja pada pemerintah daerah yang masih mengedepankan “kesungkunan” dalam menindaklanjuti hasil penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah yang rendah. Rendahnya kinerja berdampak pada kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Idealnya dalam tata kelola pemerintahan terdapat norma, standar dan prosedur yang harus menjadi acuan. Jika tidak menjadikannya acuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas kinerja, maka perlu mekanisme *punishment*. Sebaliknya, jika memegang erat acuan tersebut sehingga kualitas kinerja yang tinggi, maka perlu diberikan *reward*.

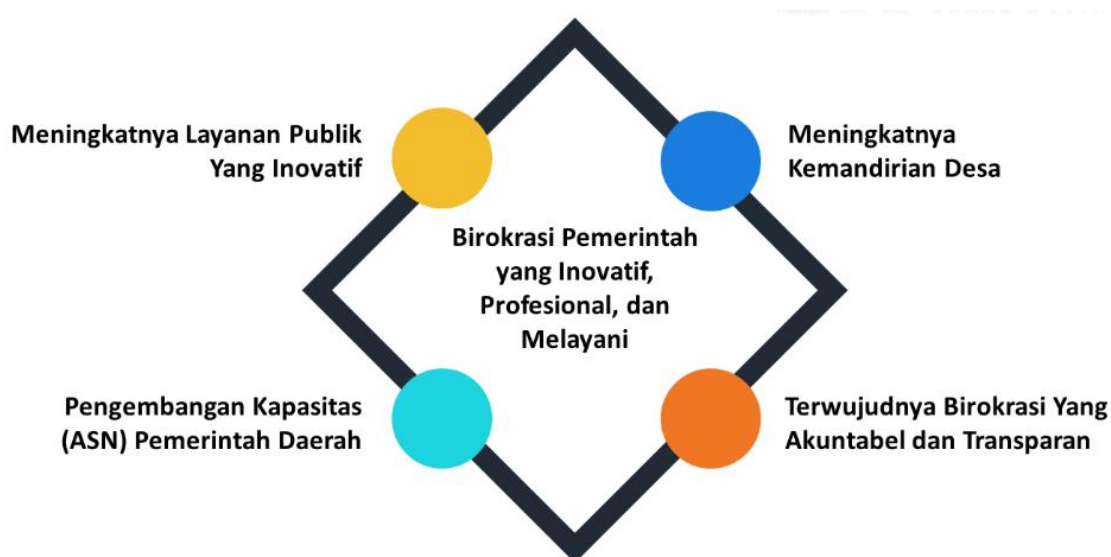
Berdasarkan isu tentang tata kelola pemerintahan di atas, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki komitmen untuk menjawab dan menyelesaikan isu tersebut dalam enam tahun yang akan datang. Komitmen tersebut tertuang di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026. Visi

pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah **“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”**.

Guna mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan menuangkan Misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya.
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Misi yang terkait dengan reformasi birokrasi ini adalah misi ke 4 yaitu “Menciptakan Birokrasi Pemerintah Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani. Berikut ini gambaran perencanaan terintegratif dalam mencapai misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pacitan:



Gambar 13 Perencanaan Terintegratif Dalam Mencapai Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pacitan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026

BAB IV SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan. Simpulan atas 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2018-2020, 2). Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3). Arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya.

Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, *responsive* dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road map Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut. Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi.

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah **“menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih”**.

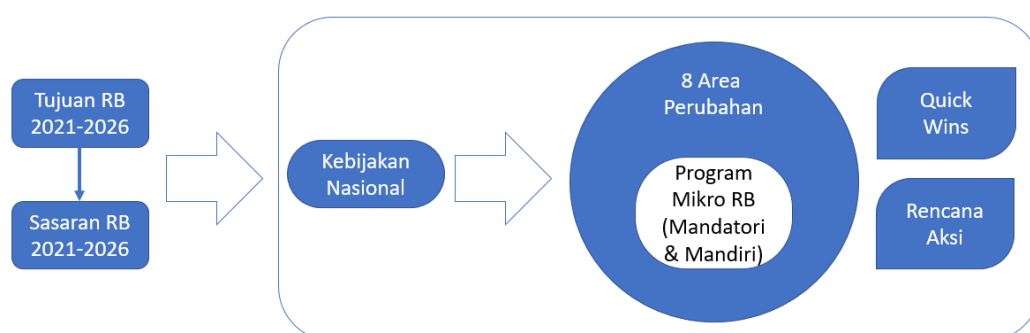
2. Sasaran

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara sebagaimana dituangkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.
2. Birokrasi yang Kapabel.
3. Pelayanan Publik yang Prima.

3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road map Reformasi Birokrasi ini menetapkan hal-hal baru yang tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari reformasi birokrasi periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 14 Strategi Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

4. Program

Pemerintah daerah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pelaksanaan program mikro dalam menerapkan reformasi birokrasi di lingkup internal organisasi. Program mikro terdiri dari kegiatan mandatori dan kegiatan mandiri. Kegiatan mandatori merupakan kegiatan yang menjadi prioritas reformasi birokrasi pemerintah daerah. Kegiatan mandatori tersebut telah diatur dalam Permenpanrb Nomor 25 tahun 2020. Adapun kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang diinisiasi sendiri oleh pemerintah daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan dengan kegiatan mandatori.

Kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu Kegiatan Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Kegiatan Prioritas Pemeliharaan untuk Hal-Hal yang Sudah Baik/Maju, Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan. Berikut ini adalah daftar kegiatan tersebut:

Tabel 1 Kegiatan Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	Tim reformasi birokrasi di kecamatan belum melaksanakan tugas secara optimal dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sosialisasi dan penguatan komitmen Kepala Daerah tentang pemahaman terhadap agen perubahan
		Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RB	
		Perlu adanya perubahan mindset dan pola kerja menjadi lebih profesional	Penguatan nilai integritas
		Perlu meningkatkan mindset dan budaya kerja melayani, supaya memuaskan pengguna layanan	
		Meningkatkan peran tugas dan fungsi agen perubahan	Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model
		Monev terhadap agen perubahan belum maksimal	
		Peran dan fungsi agen perubahan belum terlihat	Sosialisasi dan penguatan komitmen Kepala Daerah tentang pemahaman terhadap agen perubahan
		Perubahan mind set dan kulture set, sehingga dengan perubahan pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) tersebut di harapkan akan menjadi stimulan bagi tercapainya Reformasi Birokrasi	Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)
		Belum ada analisis terhadap Kontribusi <i>Agen of Change</i> terhadap perubahan kinerja	Pemantauan terhadap <i>agen of change</i> , dan menentukan representasi keberhasilan terhadap perubahan
		Mentalitas dan budaya kekuasaan masih merupakan karakter sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2	Tatalaksana	Belum adanya inovasi baru dalam mempercepat capaian kinerja maupun	Monev kinerja individu secara berkala sesuai dengan capaian kinerja

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		pelayanan	
		Rencana kerja yang tersusun belum dilaksanakan dengan maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan timeline pelaksanaan rencana kerja 2. Memastikan perencanaan berbasis kinerja
		Belum optimalnya penerapan e-budgeting dan Belum terintegrasinya <i>e-planning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan 2. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku 3. Monev pelaksanaan SIPD 4. Integrasi penerapan <i>e-planning</i> dan <i>e budgeting</i>
		Perluasan cakupan sosialisasi e-office belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) 2. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 3. Mengimplementasikan digitalisasi arsip 4. Monev pelaksanaan e-office (pusda)
		Penerapan proses bisnis dalam setiap pelayanan publik masih belum tercapai	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan peningkatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implementasi layanan berbasis informasi 2. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik
		Belum optimalnya Sistem Teknologi Informasi pendukung E-RM, E-Resep	Penyediaan infrastruktur dan aplikasi pemanfaatan one - data system untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
1		Belum optimalnya sistem elektronik sebagai sarana pemenuhan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan internal SPBE 2. Penerapan Tata Kelola SPBE 3. Penerapan Manajemen SPBE 4. Penerapan Layanan SPBE 5. Internalisasi SPBE perangkat daerah 6. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
		Banyak sistem aplikasi dan belum terintegrasi	Penyelarasan proses bisnis dan SOP
		Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP	
		Masih kurang efisiennya institusi birokrasi sendiri	
3	Penataan SDM	Perlu evaluasi beban kerja organisasi dan tugas fungsi aparatur karena masih adanya beban kerja dan tuis yang tumpang tindih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monev tupoksi terhadap beban kerja organisasi/ Monev kematangan kelembagaan perangkat daerah (Permendagri) 2. Monitoring dan evaluasi anjab ABK
		Masih sulitnya memperoleh data untuk penyusunan anjab pada setiap pegawai	1. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN
		Ketertiban pengisian E-Kinerja	1. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala yang sesuai dengan capaian kinerja organisasi
		Belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kerja
		Capaian kinerja dari masing-masing ASN belum sepenuhnya sesuai dengan tuis	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala sesuai dengan capaian kinerja organisasi
		Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelatihan aparatur pada akuntabilitas kinerja

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Belum adanya Penataan Pegawai sesuai Kebutuhan	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>talent pool</i>)
		Perlu adanya penambahan SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi sehingga beban kerja dapat berjalan dengan maksimal	Penyusunan proyeksi kebutuhan SDM lima tahun yang bersinergi dengan RPJMD
		Kinerja ASN belum optimal secara merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelatihan aparatur pada akuntabilitas kinerja 2. Penguatan implementasi Reward and Punishment berdasarkan kinerja
		Budaya kerja dan profesionalisme sumber daya aparatur yang belum sepenuhnya mampu memberikan pengaruh positif dalam proses perkembangan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional 2. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN
		Banyak posisi atau jabatan di birokrasi di isi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya	Implementasi manajemen ASN berbasis merit system
		Rendahnya kualitas SDM aparatur yang tercermin dari kondisi kesejahteraan pegawai, rekrutmen dan pembinaan karier	
		Peningkatan SDM yang menguasai materi wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi
		Peningkatan SDM yang menguasai materi tentang parpol	
		Peningkatan kompetensi pegawai di lingkup kecamatan	
		Mengikutsertakan semua pegawai dalam diklat teknis maupun struktural (dukcapil)	

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Pengembangan kapasitas personil di layanan sp2d	
		Lemahnya kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi informasi menuju e-government merupakan salah satu tantangan dan kebutuhan	
		Sipak belum bisa diakses secara menyeluruh oleh perangkat daerah	
4	Penguatan Pengawasan	Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ZI perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
		Belum dilakukan pencanangan pembangunan zona integritas level unit kerja	
		Sosialisasi dan pembuatan Peraturan tentang prosedur Whistle Blowing System (WBS)	Pembuatan sistem Whistle Blowing System (WBS) yang dapat di akses masyarakat dan dipantau langsung pejabat
		Belum adanya Monev secara berkala terhadap Gratifikasi	Penguatan pengendalian gratifikasi
		Perlu adanya sosialisasi mengenai UPG	Pendampingan tentang mekanisme pelaporan LKHPN
		Perlu adanya pendampingan pengisian LHKPN	
		Sosialisasi dan pendampingan tentang mekanisme pelaporan atas LHKPN dan LHKASN	
Perlu meningkatkan kerjasama antar tim LHKPN dan LHKASN sesuai dengan tupoksinya			

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Penetapan Tim Pengawas Internal (Penyusunan SOP Pengawasan Internal)	1. Meningkatkan Kompetensi APIP 2. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)
		Masih rendahnya kinerja yang jujur, penanganan gratifikasi dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Induksi anti korupsi kepada Kepala Daerah, anggota DPRD, dan pejabat perangkat daerah
		Belum tertibnya pengisian LKE PMPRB	Sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah berkaitan dengan penguatan mindset berkaitan dengan reformasi birokrasi
		Monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaksanakan secara kasuistik	Memantapkan kode etik secara berkesinambungan berkaitan dengan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain melalui platform IT yang terintegrasi dengan perangkat daerah
		Seluruh pegawai Disdukcapil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bersih dari KKN	
		Rencana Aksi Tindak lanjut (Renstra) oleh tim assesor belum dilaksanakan dengan baik	Pemantauan hasil tindak lanjut terhadap review Renstra
		Inspektorat meningkatkan kompetensi untuk mempersiapkan landasan bagi pencapaian level 3	1. Penguatan efektivitas manajemen risiko 2. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap APIP
		Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi agen perubahan	Sosialisasi dan penguatan komitmen Kepala Daerah tentang pemahaman terhadap agen perubahan
		Belum semua pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP	Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap APIP

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Tindak lanjut benturan kepentingan perlu ditingkatkan	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
5	Penguatan Akuntabilitas	Monev secara berkala SAKIP	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
		Sosialisasi secara berkala SAKIP ke seluruh pejabat dan staf PD	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)
			Include pemahaman terkait SAKIP dalam penilaian kinerja (indikator detail terkait tanggung jawab perorangan terhadap SAKIP)
			Tersedianya sistem informasi untuk penilaian proses SAKIP perorangan
			Penyelarasan kegiatan dalam 1 PD
			<i>Transfer of knowledge</i> dari setiap pimpinan terhadap setiap orang dalam unit/PD terkait pentingnya kerja secara tim karena seluruh kegiatan dalam pemerintahan saling terkait
			Sosialisasi terkait peningkatan pemahaman SAKIP sampai pada unit terkecil (perorangan) dari PD terkait posisis/pengaruhnya terhadap SAKIP
			Tersedianya sistem informasi untuk penilaian proses SAKIP perorangan
		Pemahaman terkait SAKIP pada perorangan sebagai unit terkecil	Sosialisasi terkait peningkatan pemahaman SAKIP sampai pada unit terkecil (perorangan) dari PD terkait posisi/pengaruhnya terhadap SAKIP
		Pelaporan SAKIP yang tidak tepat	Peningkatan kapasitas evaluator SAKIP

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
			Peringkat laporan SAKIP untuk setiap PD dalam lingkup Pemerintah Kab. Pacitan
			Komitmen monev secara berkala
		Monev secara berkala LAKIP	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala 1 tahun/3 bulanan
			Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja
		Meningkatkan kapasitas kinerja dengan melaksanakan Monev secara berkala ke masing-masing wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja Pemahaman tusi utama dengan membuat prioritas kegiatan yang benar-benar perlu dilakukan oleh setiap bagian dan perorangan
		Ketepatan waktu penyampaian laporan dari seluruh PD	Pengetatan pelaksanaan reward dan punishment seperti TPP, dll
			Pemahaman tusi utama dengan membuat prioritas kegiatan yang benar-benar perlu dilakukan oleh setiap bagian dan perorangan
		Penanganan proses pengaduan yang belum optimal, perlu penguatan budaya kerja dan tanggung jawabnya	SK penanggung jawab pengaduan
			Monev 3 bulanan untuk penanganan pengaduan
			Penguatan SOP pada PD terkait pengaduan
		Belum adanya catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang ada di Sekretariat	Sosialisasi dan monev terkait keterbukaan informasi publik kepada setiap unit dan PD
			Penguatan PPID

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Daerah	Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan masukan dan konsultasi	Sosialisasi dan monev terkait keterbukaan informasi publik kepada setiap unit dan PD
			Penguatan PPID
			Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
6	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Monitor dan evaluasi sesuai komponen standart pelayanan	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
			2. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat
			3. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
			Pembuatan standart pelayanan untuk tiap-tiap jenis pelayanan
		Kepatuhan atas pelaksanaan SOP pelayanan publik	Survei secara digital kepada penerima pelayanan sebelum/ setelah menerima pelayanan tersebut
			Penyesuaian SOP sesuai kebutuhan saat ini
			Punishment atas ketidakpatuhan pelaksanaan SOP
			Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
Perbaikan dan pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan Publik		Pemetaan prioritas anggaran dalam setiap tahun	

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
		Perlu evaluasi terhadap inovasi pelayanan publik untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) 2. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
			Delivery pemahaman tentang arti inovasi yang benar dan sama pada setiap PD
			Pelaporan terkait tindak lanjut Surat Edaran Bupati tentang kewajiban inovasi pada setiap PD (<i>1 agency 1 innovation</i>)
			Peraturan <i>reward and punishment</i> pada PD yang tidak meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi sesuai SE <i>1 agency 1 innovation</i>
		Aksesibilitas OSS RBA masih perlu ditingkatkan, agar bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat maupun stakeholder	Memperbaiki sistem OSS sesuai dengan langkah dan prosedur perizinan
			Sosialisasi pemahaman pelaku usaha mengenai akses terhadap OSS
			Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan
		Penerapan proses bisnis dalam setiap pelayanan publik	Pembentukan SPI pengawasan internal terkait kesesuaian proses dalam pelayanan
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
			Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
			Peningkatan kapasitas SDM untuk berorientasi pelayanan
		Kesadaran setiap divisi untuk lebih mengoptimalkan pelayanan satu pintu	Peningkatan kapasitas SDM untuk berorientasi pelayanan
		Masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dengan baik	Peningkatan kapasitas SDM untuk berorientasi pelayanan
		Peningkatan inovasi Pengolahan Pangan untuk peningkatan daya tarik konsumsi pangan lokal	Delivery pemahaman tentang arti inovasi yang benar dan sama pada setiap PD
			Pelaporan terkkait tindak lanjut Surat Edaran Bupati tentang kewajiban inovasi pada setiap PD (<i>1 agency 1 innovation</i>)
			Peraturan <i>reward and punishment</i> pada PD yang tidak meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi sesuai <i>SE 1 agency 1 innovation</i>
		Pelayanan publik belum seluruhnya melalui media elektronik	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
		Konektivitas alur pelayanan kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten	Percepatan penggunaan aplikasi SIKAP
			Penginterasian mulai perencanaan sampai pelaporan
			Pengintegrasi sistem pelaporan pada satu titik, sehingga tidak disibukkan dengan macam-macam pelaporan
			Keterbukaan setiap PD terhadap proses dan data
			Penyediaan layanan administrasi kependudukan di desa yang didukung oleh platform IT

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
1			terintegrasi
		Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam memberikan pelayanan yang bersifat langsung sehingga pelayanan terhadap masyarakat bersifat legalisasi	Adanya pelimpahan kewenangan sesuai regulasi yang berlaku
		Layanan pengaduan belum terkelola dengan baik	Peningkatan kapasitas penerima pengaduan
			Mempersingkat alur pengaduan sesuai kebutuhan pengaduan, tertuju langsung pada apa dan siapa yang ingin di keluhkan
			Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik
		Belum terbentuknya Mal Pelayanan Publik	MPP tingkat kecamatan per kawedanan untuk mendekatkan pelayanan pada semua masyarakat Kab. Pacitan
Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik			
7	Penataan Organisasi	Belum tercapainya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesment
		Perubahan Mindset dari Kepala Daerah	Asessment organisasi berbasis kinerja
			Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi

No	Area Perubahan	Permasalahan	Kegiatan*
1	2	3	4
8	Deregulasi Kebijakan	Kurangnya pemahaman peraturan baik dari peraturan sendiri maupun peraturan dari lintas PD	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan)
			Melakukan sosialisasi regulasi di lingkup IP
			Penguatan SDM di bidang hukum
		Banyak regulasi yang menghambat khususnya terkait dengan perijinan	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi
		Ada beberapa regulasi daerah yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP
		Perencanaan perkara di setiap SKPD belum terlaksana dengan baik	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
		Masih banyak regulasi lama yang belum dilakukan kajian dengan regulasi baru	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Keterangan :

* Warna hitam (kegiatan mandatoris); warna hijau (kegiatan mandiri)

Sumber: data diolah

Tabel 2 Kegiatan Prioritas Pemeliharaan untuk Hal-Hal yang Sudah Baik/Maju

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal Yang Sudah Dicapai/Baik	Kegiatan yang Harus Dilakukan dalam Rangka Pemeliharaan/Peningkatan
1	2	3
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP B	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
	Pembangunan Zona Integritas	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ZI menuju WBK/WBBM*
	Opini BPK WTP	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala 1 tahun/3 bulanan
	Terbentuknya Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Penguatan pengendalian gratifikasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal Yang Sudah Dicapai/Baik	Kegiatan yang Harus Dilakukan dalam Rangka Pemeliharaan/Peningkatan
1	2	3
	Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) setiap tahun	Pendampingan tentang mekanisme pelaporan LKHPN
	Terwujudnya laporan keuangan yang bersih dan akuntabel serta telah dilakukannya Publik Campaign	Penguatan <i>implementasi value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja
	Terbentuknya tim reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dengan surat keputusan	Sosialisasi dan penguatan komitmen Kepala Daerah tentang pemahaman terhadap agen perubahan
	Tingkat kapabilitas APIP	Meningkatkan Kompetensi APIP
Birokrasi yang Kapabel	Pembentukan <i>agent of change</i> atau agen perubahan	Pengembangan dan pPenguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>
	Tersusunnya dokumen Anjab untuk semua pegawai	Monitoring dan evaluasi anjab ABK
	Tersusunnya rencana kebutuhan pegawai, Penilaian kinerja pegawai, Penetapan aturan disiplin pegawai	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala yang sesuai dengan capaian kinerja organisasi
	Sudah diterapkannya E-Kinerja, pengisian LKE PMPRB, pengisian E-Reformasi	
	Proses diterapkannya e-budgeting dan e-kinerja	Integrasi penerapan e-planing dan e budgeting
Penataan proses bisnis yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government	Penyelarasan proses bisnis dan SOP	

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal Yang Sudah Dicapai/Baik	Kegiatan yang Harus Dilakukan dalam Rangka Pemeliharaan/Peningkatan
1	2	3
	Tersusunnya rencana kerja reformasi birokrasi kecamatan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi Kecamatan*
	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah diterapkan	Memantapkan kode etik secara berkesinambungan berkaitan dengan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala
Pelayanan Publik yang Prima	Pengembangan layanan pengaduan masyarakat	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain melalui platform IT yang terintergrasi dengan perangkat daerah
	Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik	Punishment atas ketidakpatuhan pelaksanaan SOP
	Hasil IKM dengan Nilai BAIK	Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	Sistem pelayanan publik melalui Teknologi Informasi	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan
	Pelaksanaan inovasi pelayanan publik	Delivery pemahaman tentang arti inovasi yang benar dan sama pada setiap PD

Keterangan :

* Warna hitam (kegiatan mandatoris); warna hijau (kegiatan mandiri)

Sumber: data diolah

Tabel 3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Lingkungan Hidup	Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	Kurangnya sarana prasarana	Kebersihan, persampahan dan rekomendasi izin usaha
	Pertamanan		Kurangnya SDM yang sesuai dengan teknik bidang pertamanan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Rekom izin usaha		Kesadaran pihak pengurus yang belum sepenuhnya mengurus secara mandiri	
Kesehatan	Pelayanan rawat jalan	RSUD dr. Darsono	Lamanya waktu tunggu dalam pelayanan rawat jalan	1. Efektifitas antrian dan Digitasisasi Rekam Medis 2. Kepatuhan jadwal pelayanan, Pelaksanaan pelayanan prima 3. Komitmen dan responsif petugas dalam pelayanan, Perbaikan sistem pelayanan Digitalisasi hasil pelayanan penunjang 4. Komitmen dan responsif petugas dalam pelayanan
	Pelayanan rawat inap		Terdapat keluhan pelayanan tentang sikap dan perilaku petugas	
	Pelayanan penunjang		Lama waktu tunggu hasil pelayanan penunjang (Farmasi, Laboratorium, dan Radiologi)	
Pelayanan Kelitbangan	Penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaa n, penerapan pengoperasi an, evaluasi kebijakan dan diseminasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah SDM peneliti yang terbatas (2 peneliti)	Penelitian dan pengkajian yang sesuai dengan kebijakan Bupati Pacitan
			Sarana dan prasarana kegiatan kelitbangan	
			SDM yang kurang sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmunya	
			Anggaran sangat kecil	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Umum DPRD	Pelayanan Administrasi Umum DPRD Kabupaten Pacitan	Menyinkronkan jadwal antara Eksekutif dan Legiaslatif yang tumpang tindih, permintaan pembuatan undangan mendadak (yang bersifat segera) dari legislatif, kadang terjadi miskomunikasi antara pengadministrasi umum dengan Ajudan Ketua terkait surat-surat masuk untuk Ketua DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kualitas penyusunan dan penyesuaian jadwal antara eksekutif dan legislatif 2. Peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan 3. Peningkatan kecepatan dan ketepatan penanganan masalah terkait Aplikasi Penatausahaan 4. Peningkatan kedisiplinan pengelola keuangan 5. Peningkatan efektivitas sosialisasi pelayanan keuangan kepada anggota DPRD
	Pelayanan Administrasi Persidangan DPRD		Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat sering mengalami keterlambatan waktu, kurang tanggap terkait apa yang perlu disiapkan dalam memfasilitasi rapat-rapat pembahasan agenda DPRD, koordinasi terkait pelayanan kegiatan-kegiatan anggota DPRD kurang maksimal	
	Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD		Aplikasi Penatausahaan sering eror, pelaporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja mengalami keterlambatan dari pengelola keuangan, penyampaian informasi terkait pelayanan administrasi keuangan kurang	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			efektif	
Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	Belum lengkapnya data untuk dimasukkan dalam sistem elektronik	Pelayanan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
	Rekomendasi IMB/PBG		Belum siapnya sistem pelayanan elektronik	
	Penyewaan Alat Berat		Kondisi dan jumlah alat berat tidak mencukupi permintaan pemohon layanan	
	Pengujian Bahan Konstruksi		SDM pelayanan yang tidak sesuai dengan kompetensi jenis layanan	
	Penyediaan air minum untuk masyarakat perdesaan		Kurangnya sumber air untuk peningkatan pelayanan air minum masyarakat perdesaan	
	Perbaikan jalan perdesaan		Kurangnya anggaran untuk meningkatkan jalan kondisi baik	
Pelayanan terhadap masyarakat dan fasilitasi Desa	Pelayanan Adminduk	Kecamatan	Terbatasnya kemampuan SDM yang menangani pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM yang menangani pelayanan 2. Perencanaan yang sesuai untuk menambah sarana dan prasarana 3. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan 4. Pendekatan kepada masyarakat
	Pelayanan KK		Sarana dan prasarana yang kurang memadai	
	Pelayanan KTP		Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan	
	Pelayanan Akte kelahiran		Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat pelayanan yang ada di kecamatan	
	Fasilitasi pembayaran PBB		Pembayaran PBB dari masyarakat tidak tepat waktu	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Proposal desa		Kurangnya SDM dan Pengetahuan perangkat desa yang menangani dalam pembuatan sistematika penulisan proposal	untuk melakukan pembinaan agar tepat waktu dalam membayar PBB 5. Pelatihan perangkat desa untuk membuat proposal
Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Pemohon harus tetap datang ke kesbangpol untuk mengambil rekomendasi penelitian, bersama dengan membawa berkas aslinya	1. Menetapkan SOP rekomendasi ijin penelitian yang efektif dan efisien 2. Memberikan pembinaan pada ormas
	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas melalui aplikasi SIOLA (Sistem Online Layanan Administrasi)		Ormas kurang memahami pentingnya surat keterangan terdaftar ormas	
Perikanan	Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	1. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 2. Peningkatan sarana dan prasarana BBI 3. Peningkatan kemampuan SDM pengelola BBI dalam
			Terbatasnya sarana dan prasarana BBI	
			Terbatasnya kemampuan BBI dalam memenuhi kebutuhan benih ikan masyarakat	
			Sosialisasi perijinan budidaya belum optimal	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Perikanan Tangkap		<p>Terbatasnya sarana dan prasarana di sentra nelayan (TPI, stasiun bahan bakar, tempat penyimpanan berpendingin dan pembekuan)</p> <p>Terbatasnya kewenangan kabupaten dalam konservasi, pengawasan, dan penindakan pelanggaran perikanan</p> <p>Belum adanya penyidik PPNS Perikanan</p>	<p>memenuhi kebutuhan benih ikan masyarakat</p> <p>4. Peningkatan sosialisasi perijinan budidaya</p> <p>5. Peningkatan sarana dan prasarana di sentra nelayan</p> <p>6. Membangun sistem koordinasi yang lebih optimal dengan stake holders lainnya</p>
	Pengelolaan produk perikanan		<p>Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan laboratorium kebijakan produk olahan</p> <p>Terbatasnya SDM dengan penguji mutu olahan hasil perikanan</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dan akses ke Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga fasilitasi kepada masyarakat belum maksimal</p>	<p>7. Pendidikan dan pelatihan PPNS</p> <p>8. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium produk perikanan sesuai standar</p> <p>9. Peningkatan kualitas dan kuantitas penguji mutu</p> <p>10. Peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat</p>

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Perijinan	Izin mendirikan bangunan atau Persetujuan pembangunan gedung	DPMPTSP Kabupaten Pacitan	Prosedur Pelayanan yang belum lengkap (KKPR)	1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia 2. Pengusulan perbup pelimpahan kewenangan bidang perizinan 3. Peningkat koordinasi lintas sektor/PD/ stakeholder 4. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dibidang pelayanan perizinan
	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)		Perangkat penyelenggaraan layanan belum terpenuhi (FPR/ Forum Pemanfaatan Ruang)	
	Produk industri rumah tangga (PIRT)		Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis yang perlu dioptimalkan	
	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)		Koordinasi dengan dinas teknis yang perlu dioptimalkan	
	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)		Koordinasi dengan dinas teknis yang perlu dioptimalkan	
	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)		Koordinasi dengan dinas teknis yang perlu dioptimalkan	
	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS B3)		Koordinasi dengan dinas teknis yang perlu dioptimalkan	
Koperasi	Layanan Bimbingan dan konsultasi penerapan akuntabilitas koperasi, standarisasi pelayanan, organisasi dan tata laksana koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan	Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, aplikasi laporan keuangan koperasi, ruang konsultasi kurang representatif	Pembangunan Klinik Koperasi, Aplikasi Keuangan Koperasi

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Pelayanan Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, ruang konsultasi kurang representatif	
	Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, jaringan wifi kurang kuat, SDM terbatas	
	Bimbingan Permasalahan Hukum Koperasi		Terbatasnya SDM Aparatur Pengawas Koperasi	
	Pelayanan Pengajuan Sertifikat Nomor Induk (NIK) Koperasi		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, jaringan wifi kurang kuat	
Tenaga Kerja (Balai Latihan Kerja)	Pelayanan masyarakat (fasilitasi pendaftaran pelatihan)		Digitalisasi (Pendaftaran pelatihan, pengembangan dan pemasaran serta pelatihan dan sertifikasi)	
	Pengembangan dan pemasaran (fasilitasi alumni berwirausaha dan penempatan tenaga kerja)		(1) Digitalisasi (Pendaftaran pelatihan, pengembangan dan pemasaran serta pelatihan dan sertifikasi) (2) Upgrade laboratorium, bengkel kerja untuk mendukung	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			kualitas pelatihan kerja	
	Pelayanan pembuatan akun SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) untuk pencari kerja dan pemberi kerja		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, ruangan dan SDM	
	Pelayanan Penerbitan surat pengiriman tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, ruangan dan SDM	
	Pelayanan SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri)		Terbatasnya sarana prasarana penunjang perangkat alat lunak antara lain laptop printer, ruangan dan SDM	
	Pelatihan dan sertifikasi (fasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi LSP/BNSP dan sertifikasi internasional)		(1) Upgrade laboratorium, bengkel kerja untuk mendukung kualitas pelatihan kerja (2) SDM yang terbatas (penambahan instruktur untuk beberapa kejuruan)	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Koperasi dan Usaha Mikro (Fasilitasi Dana Bergulir)	Fasilitasi Permodalan Dana Bergulir		Kurangnya sarana dalam pelayanan dana bergulir Penambahan SDM untuk mengoptimalkan pelayanan dana bergulir	
Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan	Adanya wabah covid 19 yang berdampak besar pada sektor kepariwisataan Baik dari segi kunjungan wisata, Pembatalan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, Pembangunan kepariwisataan yang dananya dialihkan untuk penanganan pandemi, serta menurunnya pendapatan bagi usaha kepariwisataan seperti penginapan, restoran maupun usaha perjalanan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kegiatan Promosi, 2. Pameran, Kegiatan Tahunan, 3. Penyelamatan Benda/ Bangunan / situs prasejarah dan pelestarian kesenian daerah yang ada di Kabupaten Pacitan 4. Peningkatan Sarana Pemuda dan Olahraga sebagai ruang publik dan fasilitas olahraga yang representatif, Pembinaan Cabor Prestasi dan Pemuda Pelopor 5. Peningkatan PAD sektor pariwisata
	Pelestarian Budaya dan Situs Bersejarah		Kurangnya pemahaman masyarakat akan hakikat budaya, kebermaknaan budaya sebagai aset wisata dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/ budaya sendiri	
	Izin Penggunaan Sarpras Olahraga		Rekomendasi yang mengeluarkan dinas pariwisata, tetapi kontribusi PAD masuk pada dinas Perizinan, sedangkan Pemeliharaan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			masuk Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan	
Pelayanan pada Pengunjung di Lokasi Wisata	Pelayanan Kepada Wisatawan		SOP Pelayanan	
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Pelayanan Informasi data mikro keluarga (SIGA)	Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan	Keterbatasan sarana prasarana, SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana 2. Optimalisasi Kelompok Paguyuban KB Pria 3. Perluasan jaringan, Pembentukan PIK-R Formal dan Non Formal 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan yang optimal
	Fasilitasi pelayanan KB		Masih rendahnya pencapaian KB Pria	
	Pelayanan KIE Kespro Remaja		Masih kurangnya Pendidik Sebaya di Organisasi Remaja baik berbasis Formal dan Non Formal	
	Pelayanan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		Keterbatasan SDM	
Sosial	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bagi Masyarakat Miskin	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	Belum adanya petugas Khusus ditempat pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek petugas layanan dari komponen pilar sosial 2. Penyediaan ruang pelayanan yang representatif
	Pelayanan Pengusulan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Belum adanya ruang yang terpisah untuk pelayanan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Perpustakaan Keliling Layanan Anak Layanan Sirkulasi Layanan Komputer Layanan Story Telling 	Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya lembaga yang dijalani tidak sebanding dengan alat transportasi dan tenaga Kurangnya fasilitas untuk anak/koleksi buku Masih rendahnya kesadaran tertib administrasi bagi pemustaka Terkendala di sarpras yang masih kurang memadai, Kurangnya sarpras yang memadai dan SDM 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jadwal layanan dan sarpras Meningkatkan literasi masyarakat Berupaya meningkatkan tenaga perpustakaan yang tersedia di lembaga sekolah Peningkatan kualitas dan Penambahan SDM kearsipan Peningkatan sarpras kearsipan
	<ol style="list-style-type: none"> Layanan "PUSTAKA ARU" Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Layanan "POCADI" Pojok Baca Digital 		<ol style="list-style-type: none"> Anggaran yang minim Belum semua desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan membentuk dan mengembangkan perpustakaan yang memadai sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa Kurangnya dukungan dan pemahaman tentang Perpustakaan dari pemangku kebijakan dari PD, kecamatan, desa/kelurahan terkait dengan 	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			<p>pengembangan perpustakaan di desa/kelurahan</p> <p>4. Kurangnya program kegiatan pengembangan pelibatan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan daerah maupun di perpustakaan desa/kelurahan</p> <p>5. Jam buka layanan kurang maksimal</p> <p>6. Promosi yang kurang maksimal</p>	
	<p>1. Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan Dasar (SD & SMP)</p> <p>2. Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan</p> <p>3. Pengelolaan Perpustakaan Umum</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Tenaga/Pengelola Perpustakaan</p>		<p>1. Banyaknya lembaga perpustakaan yang belum memiliki tenaga pengelola perpustakaan yang berkualitas</p> <p>2. Sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan belum memadai</p> <p>3. Kompetensi dan kualifikasi tenaga perpustakaan belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan</p> <p>4. Belum tersedianya tenaga/pengelola perpustakaan secara profesional</p>	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Sektor Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Konsultasi Pelayanan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kurang mendukung untuk melaksanakan pelayanan 2. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana/SDM belum memenuhi standar 3. Belum adanya penganggaran khusus untuk pelayanan pengadaan barang/jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi anggaran dengan Rencana Umum Pengadaan 2. Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengadaan
	Fasillitasi Verifikasi Penyedia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kurang mendukung untuk melaksanakan pelayanan 2. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana/SDM belum memenuhi standar 3. Belum adanya penganggaran khusus untuk pelayanan pengadaan barang/jasa 	
	Fasilitasi Layanan Pemilihan Penyedia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kurang mendukung untuk melaksanakan pelayanan 2. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana/SDM belum memenuhi standar 3. Belum adanya penganggaran khusus untuk pelayanan pengadaan 	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			barang/jasa	
	Fasilitasi Pembuatan akun dan SPSP		1. Sarana dan prasarana kurang mendukung untuk melaksanakan pelayanan 2. Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana/SDM belum memenuhi standar 3. Belum adanya penganggaran khusus untuk pelayanan pengadaan barang/jasa	
Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Pacitan	Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP masih Level 2+, SAKIP Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
	Pendampingan dan Asistensi		MCP KPK	
Kesehatan	Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Belum semua sasaran dapat terjangkau pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan balita paripurna	Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan
	Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Belum semua sasaran usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Kesehatan pada usia produktif		Belum semua sasaran usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			kesehatan sesuai standar	
	Kesehatan pada usia lanjut		Belum semua sasaran usia >60 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Cakupan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Belum semua sasaran program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Pelayanan Kunjungan Puskesmas		Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang belum sesuai standar pelayanan	
Layanan pengaduan publik	Layanan Pengaduan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Kurangnya sarana dan prasarana	Layanan pengaduan publik
	Layanan internet publik		Belum ada rencana yang matang terkait pemenuhan kebutuhan internet publik	
Penanganan Bencana	Penanganan Bencana	BPBD Kabupaten Pacitan	Beberapa sarpras kurang berfungsi sehingga menghambat penanganan bencana	Peningkatan kualitas pelayan dalam penanganan bencana
Pangan	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Dinas Pangan Kabupaten Pacitan	Kurangnya teknologi/inovasi baru	1. Peningkatan SDM dan Teknologi 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemananan dan mutu pangan
	Keamanan dan Mutu Pangan		Sarana prasarana untuk uji sampel masih sederhana/belum ada Laboratorium Keamanan Pangan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Cadangan pangan		Kurangnya anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk masyarakat	3. Peningkatan jumlah cadangan pangan melalui anggaran APBD
	Penanganan Kerawanan pangan		Keterbatasan stimulan bahan pangan karena keterbatasan anggaran	4. Peningkatan Anggaran dan identifikasi Penerima manfaat secara efektif
Keuangan	Pelayanan Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan	Belum terlaksananya Review atas Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Wajib Pajak Daerah, Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan terhadap WP daerah masih kurang memadai, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengelola Pendapatan Daerah belum terstandarisasi, Sistem Teknologi Informasi terkait Pelayanan atau Pembayaran Pajak Daerah masih ada yang belum terintegrasi dengan unit kerja lain atau dapat diakses oleh masyarakat sebagai wajib pajak daerah	Pengelolaan PAD terutama pada penerimaan pajak daerah (pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah)
	Koordinator Dinas Penghasil		Tidak memiliki <i>bargaining power</i> sebagai koordinator karena memiliki level kelembagaan yang sama	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Pendidikan dasar	Pengurusan ijazah hilang	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Ketika pengguna layanan tidak memiliki copy atau bukti dukung yang menguatkan keabsahan ijazahnya	Peningkatan kapasitas aparatur dan perlunya aplikasi untuk mempercepat layanan
	Pengurusan mutasi siswa		Pengguna layanan tidak melengkapi administrasi dari sekolah asalnya (luar kota)	
	Pengurusan ijin operasional sekolah		ketika ada ketidaksesuaian antara data administrasi dengan fakta di lapangan	
	Pelayanan Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa Sarpras Dikdas		Belum adanya database kebutuhan sarana dan prasarana sekolah	
	Pengurusan Cuti (melahirkan, Sakit, dan, cuti besar)		Belum adanya aplikasi pengurusan cuti	
	Pengelolaan aset		Banyaknya aset yang harus dilaporkan	
Pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni	Pelayanan penyediaan PSU	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan	Data Base RTLH belum terupdate	1. Pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni 2. Pelayanan penyediaan PSU berupa Pembangunan Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman 3. Pelayanan penyediaan Pengadaan
	Pelayanan penanganan Kawasan Kumuh		Anggaran yang terkait tidak memenuhi untuk penyediaan seluruh PSU Perumahan sehingga diperlukan skala prioritas	
	Pelayanan penyediaan Jalan Lingkungan		Jumlah banyaknya paket yang masuk terkendala oleh keterbatasan waktu dan tenaga teknis	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
	Pelayanan penyediaan Pengadaan Aset Tanah Pemda dan Pensiertifikatan		Kurangnya tenaga teknis yang diterjunkan ke lapangan	Aset Tanah Pemda dan Pensiertifikatan Aset Tanah Pemda
	Pelayanan penyediaan Penyusunan Database Aset Tanah Pemda dan Penyelesaian Sengketa Aset Tanah Pemda		Kurangnya kerja sama dilintas bidang atau lintas instansi lainnya dalam proses penyusunan	4. Pelayanan penyediaan Penyusunan Database Aset Tanah Pemda dan Penyelesaian Sengketa Aset Tanah Pemda
Perhubungan	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	Sebagian masyarakat belum bisa mengakses aplikasi pembayaran non tunai	Sosialisasi ke masyarakat agar bisa menggunakan teknologi informasi pembayaran secara non tunai
	Ijin Trayek		semakin berkurangnya masyarakat menggunakan angkutan umum dan berpindah ke angkutan pribadi	
Pelayanan pencairan dana	SP2D	BPKAD Kabupaten Pacitan	Seringnya terjadi penumpukan pekerjaan karena pengajuan pencairan yang bersamaan	Kecepatan dan ketepatan dalam pencairan dana
	Pencairan dana bantuan keuangan khusus		Seringnya terjadi penumpukan pekerjaan karena pengajuan pencairan yang bersamaan	
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan	Belum adanya Dokumen Pola karir dan Standar Kompetensi Jabatan	1. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan Pedoman Pola Karir 2. Meningkatkan
	Evaluasi Kinerja ASN		Masih rendahnya pemahaman PNS terkait Penilaian Kinerja dan Disiplin	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			ASN	kan Pemahaman ASN terhadap Kinerja dan disiplin ASN
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		1. Belum disusun proyeksi kebutuhan ASN dalam waktu 5 tahun 2. Data Kepegawaian yang belum sinkron dengan data nasional	3. Menyusun Analisa Jabatan sesuai dengan beban kerja ASN sehingga akan diketahui kebutuhan ASN
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		Masih rendahnya pengembangan kompetensi ASN	4. Melaksanakan Sinkronisasi Data Kepegawaian 5. Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN
Pelayanan Usulan Perencanaan Pembangunan	Pelayanan usulan pembangunan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	BAPPEDA Kabupaten Pacitan	Kurang terpenuhinya usulan perencanaan pembangunan, karena faktor terbatasnya anggaran	Pelayanan Usulan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
	Pelayanan usulan pembangunan bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur		Kurang terpenuhinya usulan perencanaan pembangunan, karena faktor terbatasnya anggaran	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan	Belum meratanya penyuluh pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana pertanian Peningkatan pusat kesehatan hewan Kerjasama dengan tenaga medik dan paramedik swasta
			sarana prasarana penyuluhan belum memenuhi standar baik secara kualitas dan kuantitas	
			Regenerasi petani dalam kelompok sangat lambat	
	Pengawasan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian		Rumitnya prosedur dan mekanisme pupuk bersubsidi	
	Penyediaan prasarana pertanian		Kurangnya penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi terkait sarana pertanian	
			Kurangnya kompetensi teknis infrastruktur	
	Pelayanan kesehatan hewan		Belum meratanya prasarana pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas	
			Pusat kesehatan hewan baru ada satu se kabupaten	
		Terbatasnya petugas medik dan paramedik		
Layanan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Layanan	Layanan Tera dan Tera Ulang UTTP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	SDM Penera baru 1 orang, belum adanya Pengawas Kemetrolgian	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan SDM baik Penera, Tenaga Reparatur

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
Standarisasi Produk	Layanan Standarisasi Produk	Pacitan	Pembinaan dan pendampingan IKM belum optimal, pengetahuan dan kesadaran tentang Standarisasi Produk masih kurang bagi pelaku IKM sehingga mutu produk belum standar, SDM untuk pembina industri masih kurang	<p>dan Pengawas Kemetrologan</p> <p>2. Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologan yang lengkap</p> <p>3. Peningkatan SDM pelaku Industri sehingga menghasilkan mutu produk yang dapat bersaing, semakin berkualitas dan mampu masuk dalam pasar global</p> <p>4. Peningkatan SDM Pembina Industri</p>
Penerbitan KTP elektronik	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM 3. Persyaratan tidak lengkap	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Penerbitan Akta Kematian	<p>1. Pengadaan sarpras, penambahan SDM dan sosialisasi tentang Adminduk</p> <p>2. Pengadaan sarpras dan pengadaan blangko KTP</p> <p>3. Sosialisasi tentang KIA</p>
	Penerbitan Akta Kematian		<p>1. Keterbatasan sarana dan prasarana</p> <p>2. Keterbatasan SDM</p> <p>3. Persyaratan tidak lengkap</p>	
	Penerbitan Akta Perkawinan		<p>1. Keterbatasan sarana dan prasarana</p> <p>2. Keterbatasan</p>	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			SDM 3. Persyaratan tidak lengkap	
	Penerbitan Kartu Keluarga		1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM 3. Persyaratan tidak lengkap	
	Penerbitan KTP elektronik		Sarana prasarana kurang (peralatan perekaman dan cetak KTP serta ketersediaan blangko KTP kadang kosong)	
	Penerbitan Kartu Identitas Anak		1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM 3. Persyaratan tidak lengkap	
	Surat Keterangan Pindah Datang		1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM 3. Persyaratan tidak lengkap	
Sektor ketentraman dan ketertiban	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	1. Sumber daya Aparatur kurang kompeten 2. Sistem Institusi belum berjalan sebagaimana mestinya	3. Peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP
	Penekkan Perda dan Perkada		Terbatasnya Aparatur SATPOL PP yang berkompetensi PPNS	4. Peningkatan kapasitas PPNS 5. Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
	Pelayanan Pemadam Kebakaran		1. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran 2. Terbatasnya sarana dan	

Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung jawab	Masalah/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Layanan	Prioritas
1	2	3	4	5
			prasarana pemadam kebakaran	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelayanan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan	Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penerapan pengelolaan dan pelayanan desa dengan teknologi informasi 2. Peningkatan Lembaga Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat 3. Penguatan lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Permusyawaratan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Kurangnya Inovasi dan keberanian desa untuk berkomitmen dalam pengembangan BUMDesa	
	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat		Rendahnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan Desa	

5. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, pemerintah daerah

harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, telah disusun juga program percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri.

Program percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau *Quick Wins* mandiri ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya Kabupaten Pacitan. Berikut ini adalah *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan.

Tabel 4 Quick Wins Pelaksanaan Refromasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026

No	Sektor	Quick Wins	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
1	2	3	4	5
<i>Quick Wins Mandatory</i>				
1	Sumber Daya Manusia	Penyederhanaan Birokrasi (penyetaraan jabatan fungsional, pengawas, dan pelaksana ke dalam jabatan fungsional)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat
<i>Quick Wins Mandiri</i>				
2	Keorganisasian	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat
3	Keorganisasian	Assessment organisasi berbasis kinerja		
4	Keorganisasian	Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi		
5	Sumber Daya Manusia	Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>Talent Pool</i>)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Sektor	Quick Wins	PD Penanggung Jawab	PD Terkait
1	2	3	4	5
6	Sumber Daya Manusia	Implementasi Manajemen ASN Berbasis merit sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Pemerintahan Umum	Penguatan kebijakan internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Pemerintahan Umum	Penerapan Tata Kelola SPBE		
9	Pemerintahan Umum	Penerapan Manajemen SPBE		
10	Pemerintahan Umum	Penerapan Layanan SPBE		
11	Pemerintahan Umum	Internalisasi SPBE perangkat daerah		
12	Pemerintahan Umum	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan		
13	Keorganisasian	Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat
14	Sumber Daya Manusia	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

6. Rencana Aksi

Guna memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi tahun 2021-2026 dan melihat kinerja, disusun rencana aksi reformasi birokrasi. Rencana aksi merupakan matrik kontrol pelaksanaan semua kegiatan reformasi birokrasi Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026. Melalui rencana aksi tersebut dapat dilihat indikator kegiatan, *time horizon* fokus pelaksanaan setiap kegiatan, anggaran yang dibutuhkan dan penanggungjawab kegiatan. Rencana aksi dapat dilihat pada lampiran.

BAB V MANAJEMEN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

1. Pelaksana

Pelaksana dari reformasi birokrasi ini adalah seluruh perangkat daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada Road map reformasi 2021-2026. *Leading sector* untuk menjalankan Road map tersebut ialah tim reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pelaku monitoring dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target yang tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pacitan. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten/kota bertanggungjawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menjaga rencana kerja dan capaian-capaian dalam Road map reformasi birokrasi sehingga dapat mencapai target-target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan pada unit/satuan kerja dalam lingkup pemerintah daerah. Melalui monitoring tersebut, dapat diketahui progres dari setiap capaian, juga mengetahui kendala maupun kesalahan yang muncul dalam pelaksanaan untuk kemudian menetapkan rencana tindak lanjut. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan berbagai media baik secara daring maupun secara luring. Adapun media monitoring tersebut sebagai berikut:

1. Pertemuan berkala yang dipimpin langsung oleh pimpinan perangkat daerah. Pertemuan rutin yang proporsional dapat diagendakan setiap kuartal (tiga bulan sekali).
2. Survei berkala terkait dengan bidang tugas atau pelayanan masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan survei sebaiknya dijalankan berkali sebagaimana pertemuan berkala. Hasil dari survei tersebut dapat menjadi salah satu bahasan dari pertemuan rutin. Survei dapat dijalankan secara daring maupun luring.
3. Pengelolaan pengaduan dari masyarakat.
4. Pengukuran target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun mekanisme pelaksanaan monitoring reformasi birokrasi pada lingkup Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing

Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara rutin. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja.
6. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Road map reformasi birokrasi. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Evaluasi dilakukan secara berkala, umumnya dilakukan setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut dari hasil monitoring. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan berbagai media baik secara daring maupun secara luring. Adapun media evaluasi tersebut sebagai berikut:

1. Pertemuan berkala yang dipimpin langsung oleh pimpinan perangkat daerah. Pertemuan rutin yang proporsional dapat diagendakan setiap semester (enam bulan) atau satu tahun sekali.
2. Survei berkala terkait dengan bidang tugas atau pelayanan masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan survei sebaiknya dijalankan berkala sebagaimana pertemuan berkala. Hasil dari survei tersebut dapat menjadi

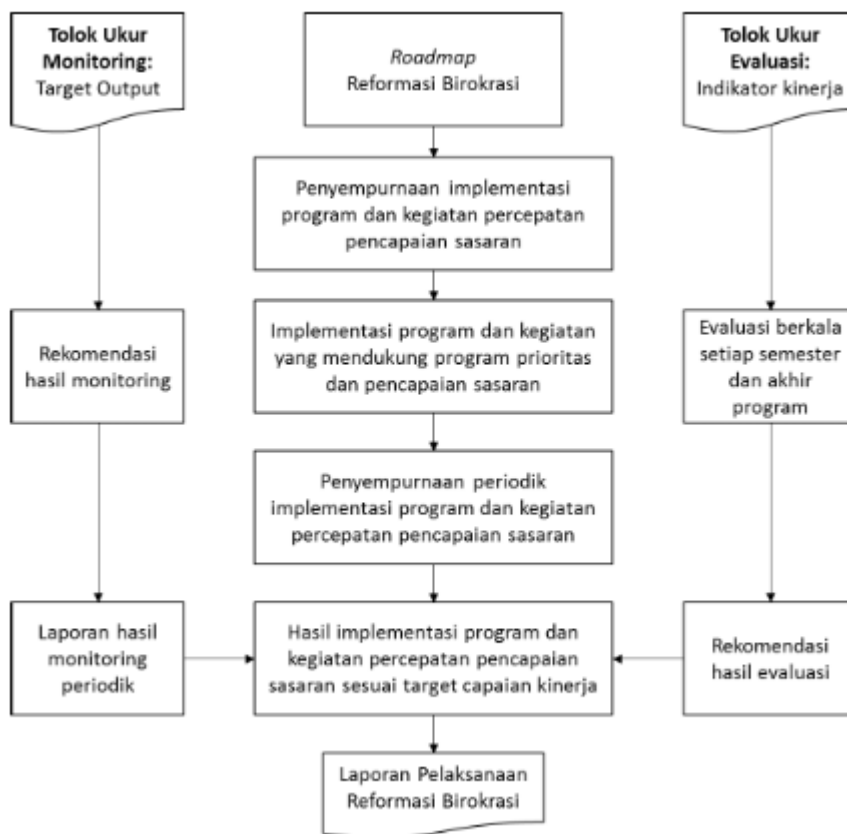
salah satu bahasan dari pertemuan rutin. Survei dapat dijalankan secara daring maupun luring.

3. Pengelolaan pengaduan dari masyarakat.
4. Pengukuran target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Adapun alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi Road map RB Kabupaten Pacitan dapat diamati pada bagan dibawah ini:



Gambar 15 Kerangka Alur Monitoring dan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi

3. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road map harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja. Di samping itu, bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah.

4. Sinkronisasi Road Map dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap perangkat daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab.

BAB VI PENUTUP

Dokumen Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh PD. Dokumen rencana aksi ini akan berfungsi dan bermanfaat jika didukung oleh komitmen pimpinan.

Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021-2026 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat *Focus Group Discussion*, menjawab permasalahan reformasi birokrasi, dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam merespon harapan tersebut. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan rencana tindak reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan.

Dalam hal demikian fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pacitan harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam implementasi Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026, yaitu:

1. Kaidah Transisi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, masa pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi tersebut akan berakhir pada tahun 2025. Begitu pula pada Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan juga akan berakhir pada tahun 2025 namun karena terdapat transisi sistem pemerintah daerah, Road

map reformasi birokrasi berakhir pada tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya pedoman baru terkait dengan *grand design* reformasi birokrasi tahun 2026-2041 yang juga menjadi pedoman penyusunan roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Pacitan tahun 2026-2031.

Selama belum disusun Peraturan Presiden tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2026-2041, maka penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2026-2031 berpedoman pada RPJMN Tahun 2024-2029 dan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026 dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kondisi pencapaian tujuan Roadmap Reformasi Birokrasi.

2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Penguatan komitmen Kepala Daerah serta pendampingan kepada perangkat daerah yang berkaitan dengan *mindset* mengenai reformasi birokrasi dan agen perubahan.
- b. Pemetaan prioritas anggaran setiap tahun.
- c. Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pacitan dalam upaya mencapai perubahan *mindset* dan *culture set* yang mengacu pada peningkatan kinerja birokrasi Pemerintah.
- d. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- e. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana tindak lanjut yang berisi kegiatan-kegiatan sebagai wujud penerjemahan arah kebijakan pelaksanaan reformasi sesuai dengan delapan area perubahan.
- f. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi dalam Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tidak serta merta menjadi tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Perangkat Daerah, melainkan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkup Kabupaten Pacitan.
- g. Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026 dilakukan evaluasi berkala sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan evaluasi tersebut mencakup mengevaluasi pencapaian tujuan reformasi birokrasi pada beberapa periode tertentu. Ketika pada periode tertentu tersebut beberapa tujuan telah tercapai maka dapat dilakukan evaluasi dengan menyesuaikan fokus dan penguatan pencapaian tujuan yang belum tercapai. Selain itu pada evaluasi Road map Reformasi Birokrasi juga dapat dilakukan penyesuaian

kegiatan dan rencana aksi yang lebih efektif dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi.

- h. Pelaksana evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah Bagian Organisasi Kabupaten Pacitan.
- i. Road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan ini berlaku hingga tahun 2026. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali Road map Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan reformasi birokrasi nasional dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Upaya untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi segenap elemen pemerintahan dan komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan Reformasi Birokrasi yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan bebas korupsi.

Lampiran 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Pacitan 2021-2026

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Program Percepatan/ <i>Quick Wins</i>										
Penyederhanaan Birokrasi (penyetaraan jabatan fungsional, pengawas, dan pelaksana ke dalam jabatan fungsional)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Disetarakannya jabatan fungsional, pengawas, dan pelaksana ke dalam jabatan fungsional	✓							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Kelembagaan	✓							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Assesment organisasi berbasis kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Kelembagaan	✓							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Kelembagaan	✓							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>Talent Pool</i>)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Implementasi Manajemen ASN Berbasis merit sistem	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks merit sistem		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguatan kebijakan internal SPBE	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks SPBE meningkat		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Penerapan Tata Kelola SPBE	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks SPBE meningkat		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Penerapan Manajemen SPBE	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks SPBE meningkat		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Penerapan Layanan SPBE	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks SPBE meningkat		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Internalisasi SPBE perangkat daerah	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks SPBE meningkat		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan terintegrasi		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Proses bisnis dan SOP selaras		✓						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah ASN yang mengikuti diklat meningkat		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<i>Kegiatan Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah</i>										
Sosialisasi dan penguatan komitmen Kepala Daerah tentang pemahaman terhadap agen perubahan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan		✓						Bagian Organisasi
Penguatan nilai integritas	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah KKN menurun	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah ASN berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi Kecamatan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	RB terlaksana di Kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan		✓						Bagian Organisasi
Pemantauan terhadap agen of change, dan menentukan representasi keberhasilan terhadap perubahan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah ASN berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan		✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Penetapan timeline pelaksanaan rencana kerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak	Adanya timeline pelaksanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bappeda

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Lanjut Monev									
Memastikan perencanaan berbasis kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Perencanaan berbasis kinerja	✓	✓						Bappeda
Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pengelolaan keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BPKAD
Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pengelolaan aset	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BPKAD
Monev pelaksanaan SIPD	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terlaksananya monev	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas Komunikasi dan Informatika
Integrasi penerapan e-planing dan e budgeting	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	E-planing dan e-budgeting terintegrasi		✓	✓	✓				Bappeda
Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pengawasan kearsipan				✓				Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pengawasan kearsipan		✓						Dinas Perpustakaan dan Arsip
Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pengawasan kearsipan			✓					Dinas Perpustakaan dan Arsip
Monev pelaksanaan e-office (pusda)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terlaksananya monev	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terlaksananya proses bisnis		✓						Bagian Organisasi
Penguatan implementasi layanan berbasis informasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang mengimplementasikan layanan berbasis informasi		✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Penyediaan infrastruktur dan aplikasi pemanfaatan one - data system untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Tersedianya infrastruktur dan aplikasi		✓	✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan monev tupoksi terhadap beban kerja organisasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Kelembagaan		✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi anjab ABK	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Profesionalitas ASN		✓		✓		✓		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓	✓					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala yang sesuai dengan capaian	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓	✓	✓	✓	✓		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
kinerja organisasi										Manusia
Menetapkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala sesuai dengan capaian kinerja organisasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓	✓	✓	✓	✓		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peningkatan pelatihan aparatur pada akuntabilitas kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓	✓					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyusunan proyeksi kebutuhan SDM lima tahun yang bersinergi dengan RPJMD	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Kebutuhan SDM Lima Tahun		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓	✓	✓	✓	✓		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks Profesionalitas ASN			✓					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah KKN menurun		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola manajemen ASN		✓						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Opini BPK	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
yang berlaku										
Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Maturitas SPIP			✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ZI menuju WBK/WBBM	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Maturitas SPIP			✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Pembuatan sistem Whistle Blowing Sytem (WBS) yang dapat di akses masyarakat dan dipantau langsung pejabat	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terbuatnya WBS		✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Penguatan pengendalian gratifikasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah temuan gratifikasi		✓	✓	✓				Inspektorat

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pendampingan tentang mekanisme pelaporan LKHPN	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah pendampingan		✓	✓					Inspektorat
Meningkatkan Kompetensi APIP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Kapabilitas APIP		✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Kapabilitas APIP		✓						Inspektorat
Induksi anti korupsi kepada kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat perangkat daerah	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah KKN menurun		✓						Inspektorat
Sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah berkaitan dengan penguatan mindset berkaitan dengan reformasi birokrasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan		✓						Bagian Organisasi
Memantapkan kodeetik secara berkesinambungan berkaitan dengan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala										
Penguatan penanganan pengaduan dan komplain melalui platform IT yang terintegrasi dengan perangkat daerah	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah aduan tertangani	✓	✓	✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemantauan hasil tindak lanjut terhadap review Renstra	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan		✓	✓	✓	✓	✓		Bappeda
Penguatan efektivitas manajemen risiko	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan		✓	✓					Inspektorat
Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap APIP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Kapabilitas APIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang terpantau	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Nilai Sakip	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan		✓	✓	✓				Bagian Organisasi
Include pemahaman terkait SAKIP dalam penilaian kinerja (indikator detail terkait tanggung jawab perorangan terhadap SAKIP)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Nilai Sakip		✓	✓					Bagian Organisasi
Tersedianya sistem informasi untuk penilaian proses SAKIP perorangan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Nilai Sakip		✓	✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelarasan kegiatan dalam 1 PD	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pemerintahan daerah		✓						Bagian Organisasi

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Transfer of knowledge dari setiap pimpinan terhadap setiap orang dalam unit/PD terkait pentingnya kerja secara tim karena seluruh kegiatan dalam pemerintahan saling terkait	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Sosialisasi terkait peningkatan pemahaman SAKIP sampai pada unit terkecil (perorangan) dari PD terkait posisi/pengaruhnya terhadap SAKIP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Nilai Sakip		✓						Bagian Organisasi
Peningkatan kapasitas evaluator SAKIP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah Evaluator yang mengikuti peningkatan kapasitas		✓	✓					Bagian Organisasi
Peringkat laporan SAKIP untuk setiap PD dalam lingkup Pemerintahan Kab. Pacitan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang melaporkan				✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LAKIP secara	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak	Evaluasi secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BPKAD

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
berkala 1 tahun/3 bulanan	Lanjut Monev									
Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		BPKAD
Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kelembagaan		✓	✓	✓	✓	✓		Bappeda
Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kepemimpinan perubahan		✓	✓					Bagian Organisasi

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pemahaman tusi utama dengan membuat prioritas kegiatan yang benar-benar perlu dilakukan oleh setiap bagian dan perorangan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan		✓	✓					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengetatan pelaksanaan reward dan punishment seperti TPP dll	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks tata kolola manajemen ASN			✓	✓	✓	✓		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SK penanggung jawab pengaduan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Penerbitan SK		✓						Bagian Organisasi
Monev 3 bulanan untuk penanganan pengaduan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah penindaklanjutan aduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
Penguatan SOP pada PD terkait pengaduan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang memiliki SOP		✓						Bagian Organisasi

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Sosialisasi dan monev terkait keterbukaan informasi publik kepada setiap unit dan PD	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik		✓	✓	✓				Bagian Organisasi
Penguatan PPID	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PPID		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks perencanaan		✓	✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Monev berkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Mendorong PD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat
Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Persentase tindak lanjut laporan SKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Inspektorat

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Pembuatan standart pelayanan untuk tiap-tiap jenis pelayanan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah pelayanan yang memiliki standar		✓						Semua PD
Survei secara digital kepada penerima pelayanan sebelum/ setelah menerima pelayanan tersebut	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah penerima layanan yang mengisi lengkap				✓	✓	✓		Semua PD
Penyesuaian SOP sesuai kebutuhan saat ini	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah SOP yang disesuaikan		✓						Semua PD
Punishment atas ketidakpatuhan pelaksanaan SOP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah punishment		✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terlaksananya reuiu dan perbaikan		✓						Semua PD
Pemetaan prioritas anggaran dalam setiap tahun	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Laporan pemetaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pelayanan publik		✓						Semua PD
Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pelayanan publik			✓	✓	✓			Semua PD
Delivery pemahaman tentang arti inovasi yang benar dan sama pada setiap PD	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Dilakukannya diseminasi		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaporan terkait tindak lanjut surat edaran bupati tentang kewajiban inovasi pada setiap PD (1 agency 1 innovation)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang memiliki Inovasi					✓			Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Peraturan reward and punishment pada PD yang tidak meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi sesuai SE 1 agency 1 innovation	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang merima reward dan punishment							✓	Dinas Komunikasi dan Informatika
Memperbaiki sistem OSS sesuai dengan langkah dan prosedur perizinan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Sistem sesuai langkah dan prosedur		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika
Sosialisasi pemahaman pelaku usaha mengenai akses terhadap OSS	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Pelaksanaan sosialisasi			✓	✓				Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pelayanan publik			✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembentukan SPI pengawasan internal terkait kesesuaian proses dalam	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Terbentuknya SPI			✓					Inspektorat

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
pelayanan										
Peningkatan kapasitas SDM untuk berorientasi pelayanan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah SDM yang mengikuti diklat		✓						Semua PD
Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pelayanan publik				✓				Dinas Komunikasi dan Informatika
Keterbukaan setiap PD terhadap proses dan data	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah PD yang mengirimkan data	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan layanan administrasi kependudukan di desa yang didukung oleh platform IT terintegrasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Pelayanan elektronik Adminduk kecamatan terintegrasi			✓					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Adanya pelimpahan kewenangan ke kecamatan sesuai	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak	Penerbikan SK pelimpahan wewenah		✓						Sekretariat Daerah

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
regulasi yang berlaku	Lanjut Monev									
Mempersingkat alur pengaduan sesuai kebutuhan pengaduan, tertuju langsung pada apa dan siapa yang ingin di keluhkan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah alur yang dipersingkat		✓						Semua PD
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		✓	✓	✓	✓	✓		Semua PD
Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks pelayanan publik		✓						Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan)	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks reformasi hukum		✓						Bagian Hukum
Melakukan sosialisasi regulasi di lingkup IP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah sosialisasi			✓					Bagian Hukum
Penguatan SDM di bidang hukum	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Jumlah SDM yang mengikuti diklat hukum				✓				Bagian Hukum
Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks reformasi hukum		✓						Bagian Hukum
Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks refromasi hukum		✓						Bagian Hukum
Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kualitas kebijakan		✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Hukum

Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Perencanaan-Pelaksanaan-Monev-Tindak Lanjut Monev	Indeks kualitas kebijakan					✓	✓		Bagian Hukum

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

